

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN UUD 1945 MELALUI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Ferdinand Kerebungu¹, Siti Fathimah²

^{1,2} Universitas Negeri Manado

e-mail: ¹ferdinankerebungu@unima.ac.id, ²sitifathimah@unima.ac.id

Abstrak

Multikulturalisme merupakan sebuah paham yang menekankan pada kesetaraan dan kesederajatan ditengah perbedaan tanpa mengabaikan hak-hak eksistensi budaya yang lain. Kondisi ini penting untuk kita pahami dan ketahui bersama dalam kehidupan bermasyarakat yang multicultural seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila tidak diterapkan, kemungkinan besar akan terjadi perselisihan secara berkepanjangan dan berakhir menjadi konflik diantara masyarakat kita, akibat ketidakpahaman dan ketidaktahuan dalam menghadapi realitas multikultur. Untuk itu adapun salah satu cara dalam mengatasi rendahnya pemahaman masyarakat akan wawasan multikultur adalah melalui pendidikan. Dengan cara membangkitkan kembali wawasan nusantara dan membangun kesadaran nasional melalui pendidikan multikultural. Kondisi ini diharapkan mampu untuk meminimalisir akan terjadinya perpecahan, meskipun pertikaian dan konflik merupakan salah satu gejala sosial yang tidak dapat dielakkan. Namun jikalau terjadi api-api pertikaian, maka konflik yang terjadi tidak berlangsung secara berkepanjangan. Dengan demikian, melalui pendidikan multikultural ini diharapkan mampu menumbuhkan dalam setiap diri anak bangsa rasa/ sikap nasionalisme. Nasionalisme merupakan salah satu paham yang menciptakan serta mempertahankan kedaulatan sebuah Negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Bagi bangsa Indonesia identitas bersama yang dimiliki yaitu Pancasila. Pancasila yang lahir dari budaya bangsa ini, sudah mencerminkan suatu pola persatuan dan kerukunan antar sesama anak bangsa, untuk itu tulisan ini berusaha untuk mengkonsepkan penerapan aktualisasi nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 melalui pendidikan multikultural.

Kata Kunci: aktualisasi, pancasila dan UUD 1945, dan pendidikan multikultural.

Abstract

Multiculturalism is an understanding that emphasizes equality and equality amid differences without ignoring the rights of other cultures. This condition is important for us to understand and know together in the life of a multicultural society like Indonesia. If not, there will likely be divisions in our society, due to misunderstanding and misunderstanding in the face of multicultural realities. For this reason, one way to overcome the public's low understanding of multicultural insight is through education. By reviving the archipelago insight and building national awareness through multicultural education. This condition is expected to be able to minimize the occurrence of divisions, even though disputes and conflicts are one of the social phenomena that cannot be avoided. However, if there are fires of conflict, then the conflict will not last for a long time. Thus, through multicultural education, it is expected to be able to grow in every child of the nation a sense of nationalism. Nationalism is one of the notions that creates and maintains the sovereignty of a country by realizing a common identity concept for a group of people. For the Indonesian people, their shared identity is Pancasila. Pancasila which was born from the culture of this nation, already reflects a pattern of unity and harmony among the nation's children, for this reason, this paper seeks to conceptualize the actualization of Pancasila values and the 1945 Constitution through multicultural education.

Keywords: actualization, Pancasila and the 1945 Constitution, multicultural education.

1. PENDAHULUAN

Syarat terwujudnya sebuah bangsa yang kuat apabila memiliki rasa atau kehendak untuk bersatu. Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan mengingatkan bahwa prasyarat pendirian

bangsa dan negara adalah didasarkan kepada keinginan yang kuat dari setiap elemen masyarakat untuk bersatu. Dalam konteks kelangsungan hidup suatu negara, pencapaian apa yang disebut “mitos integrasi total”, yaitu keadaan harmoni tanpa konflik atau konflik, di mana individu bergabung ke dalam komunitas yang lebih besar, sangat penting. tidak ada konfrontasi dan konfrontasi, dan sulit diwujudkan tanpa desain integrasi nasional (Said, 2013).

Hal inilah yang dicoba oleh para pahlawan bangsa di awal dekade kemerdekaan bangsa Indonesia. Dimana sejak awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah bersepakat untuk menjunjung tinggi kebersamaan dalam perbedaan. Kebersamaan dalam perbedaan tersebut dapat di lihat dalam simbol Negara kita yaitu Burung Garuda yang mencekeram pita yang bertuliskan “Bhineka Tunggal Ika”. Pemilihan kata Bhineka Tunggal Ika tidak hanya dipikirkan sesaat oleh para pendiri bangsa ini, tetapi sudah melalui sejarah panjang perjuangan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diawali dari berdirinya perkumpulan kaum intelektual muda yang membentuk organisasi Budi Utomo, kemudian prakarsa kaum muda dari seluruh kepulauan Indonesia yang secara bersama-sama mengikrarkan “Sumpah Pemuda” bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu yaitu Indonesia, sampai pembacaan teks proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, dan puncaknya pada saat penetapan Dasar Negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.

Jika kita perhatikan sejarah perjalanan panjang bangsa ini, kita menemukan bahwa multikultural tidak menjadi persoalan oleh para perintis kemerdekaan dan bahkan dengan segala kearifan mereka menyadari bahwa multicultural yang kita miliki merupakan suatu asset atau kekayaan bangsa ini yang dapat dijadikan modal social dalam membangun bangsa ini. Mengapa multicultural dapat dijadikan modal social untuk membangun bangsa? Secara sosiologis dan antropologis, masyarakat dan budaya Indonesia merupakan yang terbesar di Dunia, kenyataan ini dapat di lihat dari kondisi sosio-kultural yang terdiri dari berbagai etnis, bahasa, dan agama dan system kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

Walaupun demikian, kekayaan tersebut tidak memiliki resiko yang besar, kondisi masyarakat yang demikian sangat rentan dengan berbagai kasus seperti KKN, konflik, dan berbagai gerakan separatism. Persoalan ini mungkin terjadi karena disebabkan oleh kondisi social-budaya masyarakat Indonesia yang begitu besar jaraknya, misalnya antara masyarakat biasa dengan pejabat, kesenjangan antar pejabat, antar daerah, persoalan lain yang sering kita saksikan di negeri ini adalah tidak ditegakkannya supremasi hukum, hilangnya rasa kemanusiaan untuk menghormati hak-hak asasi orang lain, dan berbagai persoalan lain yang dapat memicu masalah disintegrasi bangsa, sebagai resiko yang dihadapi oleh suatu masyarakat yang multikultur. Nadilla Rahmanul Hakim dalam tulisannya juga mengemukakan demikian, bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang beragam memang sangatlah tepat. Sebagai negara besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, sumber daya alam yang melimpah, wilayah yang sangat luas, dan kekayaan budaya dan bahasa yang sangat beragam, Indonesia memiliki potensi yang besar dan juga masalah yang besar. Artinya, selain potensi positif yang besar di Indonesia, juga terdapat potensi atau masalah negatif yang besar. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan sangat beragam baik dari segi agama, ras, suku, adat istiadat, seni dan budaya. Berdasarkan kenyataan ini, di Indonesia sangat rentan terjadinya konflik antar sesama warga negara yang mendasari perbedaan tersebut (Hakim, 2020).

Banyak kasus konflik yang pernah terjadi di tanah air ini, diantaranya adalah tragedi Sampit pada tahun 2001 (Hakim, 2020). Tahun 2001 merupakan salah satu sejarah tergelap di Indonesia, khususnya di wilayah Sampit. Tragedi Sampit adalah pemberontakan mengerikan yang melibatkan dua suku, Dayak dan Madura. 500 orang tewas, 100 di antaranya dipenggal. Konflik bernuansa agama di Ambon Pada tahun 1999, konflik tersebut awalnya dianggap sebagai konflik biasa. Namun, ada kecurigaan bahwa ada pihak yang secara sadar berencana

memanfaatkan permasalahan yang ada. Selain itu, ABRI juga gagal merespons secara memadai, bahkan disinyalir telah bertindak sengaja untuk melanggengkan konflik dan mengalihkan perhatian dari isu-isu penting lainnya. Kasus kerusuhan ini mengakibatkan hubungan sosial antar pemeluk agama di Indonesia menjadi memanas berkepanjangan.

Begitu juga dengan tragedi konflik tahun 1998, konflik tersebut dipicu oleh krisis mata uang yang melumpuhkan sendi-sendi negara dan meningkat menjadi konflik antara masyarakat adat dan Tionghoa perantauan. Akibat konflik tersebut, banyak harta benda orang Tionghoa dijarah dan dibakar. Ada juga banyak laporan tentang pelecehan seksual yang terjadi dan pembunuhan yang tidak dapat dihindari. Konflik antar etnis ini benar-benar mengubah Indonesia menjadi lautan darah. Tidak hanya itu, konflik antar golongan dan pemerintah (GAM, RMS dan OPM) juga turut andil dalam menyemarakkan kondisi masalah sosial pada saat itu. Konflik antar kelompok sering terjadi di Indonesia, namun yang paling serius adalah penentangan GAM terhadap pemerintah, yang akhirnya merembet ke masyarakat internasional. Konflik ini muncul dari keinginan untuk merdeka dari negara Indonesia. Sayangnya, pemerintah tidak memprioritaskan dialog, dan operasi militer dilakukan pada pemerintah selama bertahun-tahun, yang mengakibatkan banyak korban. Perselisihan tersebut akhirnya terselesaikan setelah tercapai kesepakatan untuk menjadikan Aceh sebagai wilayah pemerintahan sendiri yang khusus.

Demikian pula, dalam kasus Syiah Sunni Sampan Madura, bukan karena faktor agama atau ideologi tertentu, tetapi karena berbagai penyebab yang saling terkait. Agama biasanya dibawa sebagai faktor pembenar atau untuk menutupi konflik yang sebenarnya. Pertama, krisis di berbagai sektor yang terjadi beberapa tahun yang lalu akhirnya membuat sebagian masyarakat menentang pejabat pemerintah yang selama bertahun-tahun bersikap dingin kepada sebagian masyarakat. antara kelompok masyarakat yang berbeda. Kedua, globalisasi informasi juga telah mengembangkan pemahaman keagamaan, yang semakin menciptakan eksklusivitas dan kepekaan terhadap kepentingan kelompok. Ketiga, perbedaan sosial, ekonomi dan politik (Azzuhri, 2012). Konflik tidak hanya terjadi oleh perbedaan agama dan kultur belaka, melainkan dengan adanya ketimpangan distribusi kekuasaan, konflik antar institusi, perilaku ormas, hubungan masyarakat dengan aparatur negara, hubungan pusat dan daerah, hingga munculnya separatisme. Hal ini diuraikan dalam penelitian Ferdinand Kerebungu, yang memetakan potensi konflik dan integrasi bangsa (Kerebungu, 2019). Kasus berkepanjangan di Palu dan beberapa wilayah di Sulawesi Utara juga turut andil dalam mewarnai kisah pertarungan antar golongan di wilayah ini (Kerebungu et al., 2020; Kerebungu & Fathimah, 2020).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pentingnya mempraktekkan pemahaman multikultural tidak muncul sebagai konsep atau pemikiran yang kosong, tetapi ada kepentingan politik, sosial, ekonomi dan intelektual yang mendorongnya. Akar kata multikulturalisme adalah budaya. Secara etimologis, multikulturalisme terbentuk dari kata *multi* (banyak), *culture* (budaya) dan *ism* (aliran/paham). Pada dasarnya, istilah tersebut berarti mengakui harkat dan martabat manusia yang hidup dalam masyarakat dengan budayanya sendiri. Konsep multikulturalisme tidak boleh disamakan dengan konsep keragaman etnis atau budaya yang menjadi ciri masyarakat pluralistik, karena multikulturalisme menekankan keragaman budaya dalam kesetaraan atau kesetaraan budaya (Mahfud, 2016). Atau menurut Kymlicka, sebuah gerakan politik tentang hak-hak minoritas yang ditegakkan secara tidak adil oleh sistem liberal. Kymlicka berpendapat bahwa sistem liberal yang mengutamakan hak asasi manusia terkait dengan keberadaan kelompok minoritas, karena minoritas dipaksa untuk mengasimilasi, menerima bahasa, agama, dan adat istiadat mereka dari kelompok mayoritas, dan menjalani metode pembersihan etnis yang radikal. Hal tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan masalah (genosida) juga dilakukan, seperti yang terjadi di Amerika dan Jerman. Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa multikulturalisme merupakan gerakan untuk mewujudkan persamaan perbedaan budaya (Kymlicka, 2015).

Kymlicka, penyebab multikulturalisme dalam kerangka politik multikultural, berpendapat bahwa munculnya multikulturalisme memiliki dua sisi. Artinya, migrasi ke daerah dan kebanggaan sebagai minoritas. Aspek pertama adalah studi kasus yang diselidiki di Amerika Serikat, Kanada dan Australia, yang dialami oleh negara-negara tujuan imigrasi. Aspek kedua lebih mementingkan unsur identitas seseorang, yang dirasakan lebih kuat dari rasa kebangsaannya (Kymlicka, 2015). Beragam factor penyebab terjadinya perpecahan turut andil dalam menyeruakkan terjadinya konflik tersebut. Beberapa kasus di atas merupakan sebagian kecil konflik yang pernah terjadi di tanah air ini, banyak peristiwa memilukan lainnya yang berakibat pada pertumpahan darah, kerusakan lingkungan hingga terjadinya disintegrasi bangsa.

Menghadapi persoalan tersebut kita tidak boleh pesimis dengan kondisi masyarakat yang multikultur ini, banyak cara yang dapat ditempuh untuk mengelolah asset bangsa ini, yang saya katakana sebagai modal social. Negara kita memiliki budaya Paternalistik, artinya para pemimpin bangsa, tokoh masyarakat dan tokoh agama harus dapat menjadi panutan bagi masyarakat luas bagaimana hidup dalam masyarakat multikultur, dapat memotivasi dan memberi contoh bagi masyarakat, selain itu, dalam system pendidikan nasional perlu dirumuskan system pendidikan multicultural bagi setiap jenjang pendidikan yang ada. Banyak tulisan yang membahas bagaimana pentingnya penerapan nilai-nilai pancasila, mulai dari strategi penerapan nilai-nilai Pancasila dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan TSM (terstruktur, sistemik dan massif) secara konkrit (Nainggolan & Sasongko, 2020) dan lain sebagainya. Sememntara itu dalam tulisan ini akan diuraikan bagaimana pendidikan multicultural di terapkan dalam pembelajaran di lingkungan perkuliahan, mulai dari unsur-unsur nilai Pancasila yang diterapkan hingga arti dan makna multicultural itu sendiri dalam menyikapi masyarakat yang multikultur.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan studi literatur. Survei kepustakaan ini merupakan rangkaian kegiatan tentang cara mengumpulkan bahan pustaka, cara membaca dan mencatat, serta cara mengelola bahan penelitian (Zed, 2008). Tujuan dari penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh penulis adalah untuk menemukan dasar untuk memperoleh suatu pemikiran, menemukan kerangka berpikir, untuk mensurvei apa yang diketahui dan tidak diketahui tentang suatu fenomena tertentu, dan untuk mempresentasikan hasilnya. penelitian sebelumnya (Afiyanti, 2014). Data literatur yang penulis gunakan adalah literatur dari berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, media elektronik atau media cetak dan sumber lainnya. Berikut langkah-langkah penelitian studi literatur menurut (Nazir, 2005) adalah yang pertama Pengumpulan data Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam studi kasus ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari literatur, serta dari buku-buku, karya tulis ilmiah, dan kajian tentang pendidikan multikultural, nilai-nilai Pancasila, persatuan bangsa NKRI. Indonesia, dan wawasan kebangsaan serta referensi dari sumber lain yang berkaitan dengan topic tulisan ini. Kedua adalah melalui pengolahan dan analisa data; setelah mendapatkan data yang diperoleh selanjutnya dilakukan proses pengolahan data. Pengolahan data dimaksudkan untuk memudahkan analisis data. Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah mengembangkan metodologi untuk melakukan pekerjaan, menuliskan hasil pencarian literatur, dan menarik kesimpulan dari temuan yang diperoleh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Unsur-Unsur Nilai Pancasila dan UUD 1945

Pancasila sebagai dasar bangsa dan falsafah hidup yang melandasi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara, Pancasila terbukti mampu mengayomi dan melindungi seluruh warga negara yang berbeda suku, agama dan ras. Lima sila Pancasila merupakan pedoman yang sangat ideal untuk mengatur perilaku seluruh warga negara Indonesia ketika berhadapan dengan warga negara yang berbeda suku bangsa, ras, agama, bahkan antar golongan lainnya, sehingga mampu menjaga keutuhan NKRI. Sistem nilai dalam Pancasila merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Sila pertama Pancasila, “Ketuhanan yang Maha Esa”, Secara hierarkis, nilai ini dapat disebut nilai tertinggi karena merupakan nilai mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini (nilai ketuhanan). Perbuatan yang tidak melanggar nilai, aturan, dan hukum Tuhan dianggap baik. Pandangan seperti itu dapat dibuktikan secara empiris bahwa perbuatan yang melanggar nilai, aturan, dan hukum Tuhan, baik dalam hubungan cinta kasih antar sesama maupun tidak, menimbulkan konflik dan permusuhan. Dari nilai ketuhanan menghasilkan nilai spiritualitas, ketaatan, dan toleransi (Surip et al., 2015). Sila pertama mengatur bahwa orang Indonesia harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya dan mengekspresikan keyakinan agamanya dalam sikap saling menghormati dan bekerja sama di antara orang-orang antar umat beragama.

Sila kedua, Suatu tindakan dianggap baik jika sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip utama nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan kesopanan. Keadilan membutuhkan keseimbangan antara tubuh dan pikiran, individu dan masyarakat, makhluk dan makhluk yang bebas dan mandiri yang terikat oleh hukum-hukum Tuhan. Peradaban menunjukkan keunggulan manusia atas makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuhan dan benda mati. Oleh karena itu, suatu tindakan dikatakan baik jika selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan konsep keadilan dan kesusilaan. Misalnya, nilai kemanusiaan menghasilkan nilai moral seperti tolong-menolong, rasa syukur, saling menghormati, dan kerja sama (Surip et al., 2015). Sila ini mengatur bahwa dalam kehidupan sosial kita harus saling menghormati dan mencintai, toleran, tidak sewenang-wenang, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa diskriminasi.

Sila ketiga, menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan berdasarkan Bhineka Tunggal Ika dan menempatkan kepentingan dan keamanan nasional di atas kepentingan individu atau kelompok (Damayanti, 2017). Maksud dari nilai persatuan ini adalah tindakan yang disebut baik jika mampu mempererat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri adalah perilaku yang buruk, begitu pula sikap yang memecah belah persatuan. Sangat mungkin seseorang tampak bertindak atas nama agama (sila pertama), tetapi jika tindakan dapat merusak persatuan dan kesatuan, maka dari sudut pandang etika Pancasila: itu bukan perilaku yang baik. Dari persatuan muncul nilai-nilai seperti cinta tanah air, pengorbanan, dll. (Surip et al., 2015).

Sila keempat, menjamin persamaan hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. sila ini juga mengajarkan bahwa keputusan dibuat atas dasar akal sehat dan itikad baik dalam kebaikan bersama, mengutamakan musyawarah dan melaksanakan konsekuensi dari keputusan musyawarah. Sila kelima ini menekankan pentingnya koeksistensi keluarga dan kerja sama timbal balik. Kebersamaan ini juga harus tercermin dalam berbagi kemajuan dan kemakmuran yang adil dan berkeadilan sosial. Kohlberg mengatakan keadilan adalah kebajikan yang paling penting bagi setiap individu dan masyarakat. Keadilan mengandaikan satu sama lain sebagai mitra yang bebas dan setara (Kohlberg, 1995). Perbuatan mulia berkembang dari nilai ini, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.

Semua poin yang terkandung dalam lima sila Pancasila sebenarnya merupakan landasan ideal bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga keutuhan bangsanya.

Sayangnya, situasi tersebut telah terganggu oleh serangan teroris dan munculnya radikalisme yang menyebabkan intoleransi di negeri ini. Kelompok intoleran di Indonesia mulai beraksi pada akhir 1990-an dengan perubahan signifikan dalam pemerintahan Indonesia. Di era reformasi pasca lengsernya Presiden Suharto, B.J. Habibie mendorong untuk menyerukan agar perubahan sistem politik menjadi lebih demokratis dan transparan, hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik Indonesia. Hal ini akan menjadikan politik sebagai arena publik bagi semua orang untuk berpartisipasi, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia (WNI) untuk menyampaikan pendapat, membentuk perkumpulan, dan mendirikan partai politik (Effendy, 2003; Singh, 2001).

Pada prinsipnya, Pancasila bukan hanya dasar nasional bangsa Indonesia, tetapi juga berlaku universal bagi semua masyarakat internasional. Lima Perintah Pancasila memberikan arah bagi semua perjalanan bangsa-bangsa di dunia dengan nilai-nilai yang berlaku universal. (Rismawati, 2011). Pancasila dapat dengan mudah diimplementasikan oleh negara manapun sebagai warga dunia tanpa membedakan ras, warna kulit atau agama. Jika demikian, cita-cita dunia untuk mencapai keadaan aman, damai, dan sejahtera tidak lagi diperlukan tetapi menjadi kenyataan. Cita-cita Pancasila sejalan dengan aspirasi dan cita-cita dunia internasional. Di masa reformasi seperti saat ini, begitu banyak tantangan yang sudah, sedang dan akan dihadapi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dalam hal ini aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dapat diterapkan dalam beragam aspek kehidupan. Diantaranya adalah Aspek politik & hukum, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, & aspek pendidikan. Namun dalam tulisan ini khusus akan dijelaskan bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 melalui aspek pendidikan yaitu lebih spesifiknya dalam pendidikan multicultural di dalam lingkungan pembelajaran di kelas.

3.2. Aktualisasi Pendidikan Multikultural sebagai Solusi dalam Menghadapi Masyarakat Multikultur

Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Aktualisasi Pancasila dan UUD 1945, berarti penjabaran nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam hal ini, penjabaran nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 melalui pendidikan multicultural di sekolah. Melalui pendidikan multicultural diharapkan unsur-unsur dan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dan UUD 1945 dapat meningkatkan rasa nasionalitas dalam berbangsa dan bertanah air Indonesia dan mewujudkan NKRI yang utuh tanpa terpecah-pecah.

Multikulturalisme mengakui dan menghormati keberadaan semua kelompok heterogen dalam suatu organisasi atau masyarakat, mengakui perbedaan sosial budaya yang beragam, dan menghormati kelanjutannya dalam konteks budaya inklusif yang memberdayakan setiap organisasi atau masyarakat. memungkinkan kontribusi yang berarti. Istilah multikulturalisme digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut (Mudzhar, 2004). Pendidikan multicultural juga merupakan suatu proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural (Kerebungu et al., 2019).

Paham multikulturalisme ini lahir dikarenakan adanya masyarakat majemuk. Adapun beberapa negara yang sangat serius dalam mengembangkan konsep dan teori-teori multikulturalisme serta pendidikan multikulturalisme ini adalah Amerika, Kanada, dan Australia. Ini karena mereka adalah komunitas imigran dan kesempatan bagi imigran lain untuk bergabung dan berpartisipasi tidak dapat disangkal. Namun, negara-negara tersebut adalah contoh negara yang berhasil mengembangkan masyarakat multikultural, di mana identitas nasional dapat dibangun tanpa kehilangan atau kehilangan identitas budaya sebelumnya atau budaya nenek moyang mereka.

Multikulturalisme merupakan konsep penting dalam membangun kekuatan suatu bangsa yang terdiri dari beragam latar belakang etnis, agama, ras, budaya dan bahasa dengan menghormati dan menghormati hak-hak sipil, termasuk hak kelompok minoritas. Sikap apresiatif ini dapat meningkatkan partisipasi dalam pembangunan bangsa. Karena mereka bangga dengan kebesaran negaranya. Munculnya multikulturalisme di Indonesia merupakan hasil dari kondisi sosial budaya dan geografis yang beragam dan luas. Secara geografis Indonesia memiliki banyak pulau dan setiap pulau dihuni oleh sekelompok orang yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat inilah terbentuk suatu budaya tentang masyarakat itu sendiri. Tentu saja ini mempengaruhi keberadaan begitu banyak budaya yang berbeda (Azzuhri, 2012).

Di Indonesia sendiri, dalam praktek multikulturalisme, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat terbentuknya multikulturalisme di masyarakat. Salah satu cara terbaik agar multikulturalisme dapat berjalan dengan baik di Indonesia adalah dengan menetapkan sekolah-sekolah hingga tingkat universitas sebagai pusat sosialisasi dan pembinaan nilai-nilai yang dicita-citakan tersebut, atau pendidikan multikultural. Inti dari pemahaman ini adalah toleransi untuk melayani kepentingan bersama, menghormati kepercayaan dan berurusan dengan semua anggota masyarakat. Menumbuhkan rasa saling menghormati tanpa membedakan kelompok seperti gender, suku, ras, budaya, kelas sosial atau agama. Lebih lanjut, pembelajaran multikultural mengacu pada kebijakan dalam praktik pendidikan yang mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia mengenai gender, ras, dan kelas. (Sleeter & Grant, 2003). Pendidikan multikultural dalam kurikulum Indonesia merupakan upaya menjaga integrasi bangsa melalui pendidikan. Kurikulum pendidikan pada dasarnya merupakan perwujudan cita-cita masyarakat tentang arah pendidikan (Lionar & Mulyana, 2019).

Skeel dalam tulisannya menyebutkan bahwa pendidikan multikultural adalah suatu sikap untuk mempertimbangkan keunikan manusia tanpa membedakan ras, budaya, jenis kelamin, jenis kelamin, kondisi fisik, status ekonomi, dll. (Skeel, 1995). Pendidikan multikultural (*multicultural education*) adalah Strategi pendidikan yang menggunakan keragaman latar belakang budaya siswa sebagai salah satu kekuatannya dan menumbuhkan sikap multikultural. Strategi ini dapat sangat membantu, setidaknya bagi sekolah sebagai lembaga pendidikan, untuk mengembangkan pemahaman bersama yang lebih luas tentang budaya, perbedaan budaya, kesetaraan, dan konsep demokrasi (Alo, 2005). Pendidikan multikultural juga Ini didefinisikan sebagai kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan budaya dan saling menghormati antara semua kelompok budaya dalam masyarakat. Pembelajaran multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan nasional untuk memungkinkan masyarakat multikultural berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal di negaranya (A. Bank, 1993).

Beragam pendekatan pendidikan yang dapat dikombinasikan dalam pembelajaran pendidikan multikultural. Diantaranya adalah dengan mengintegrasikan budaya dan kelompok yang berbeda untuk menjelaskan konsep dasar, generalisasi, dan teori subjek/

bidang, Seperti seorang guru yang memasukkan fakta tentang kepahlawanan berbagai kelompok ke dalam kurikulum dengan membatasi mereka. RPP dan unit belajar juga tidak berubah. Beberapa pendekatan memungkinkan guru untuk menambahkan beberapa unit atau tema khusus untuk materi multikultural. Bisa juga dilakukan dengan melibatkan siswa/mahasiswa dalam memahami makna budaya mata pelajaran (disiplin). Misalnya, guru membantu siswa memahami perspektif yang berbeda dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin ilmu.

Dalam rangka meningkatkan prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya ataupun sosial, tentunya sebagai pendidik harus mempersiapkan dan menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa. Misalnya, ketika anak-anak datang ke sekolah dengan perilaku negatif dan kesalahpahaman tentang berbagai ras, etnis, dan kelompok etnis lainnya, pendidikan dapat membantu siswa untuk berinteraksi satu sama lain dengan menciptakan kondisi yang stabil dan pasti, membantu Anda mengambil tindakan yang lebih positif. Mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka. Misalnya, merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan kerjasama (*cooperative learning*) daripada metode kompetitif (*competitive learning*). Aspek ini bertujuan untuk membentuk lingkungan sekolah menjadi banyak jenis kelompok, termasuk suku, perempuan dan siswa berkebutuhan khusus, memberikan pengalaman pendidikan dengan hak yang sama dan kesempatan belajar yang sama, juga terkait dengan pendidikan.

Pembelajaran multikultural didasarkan pada konsep filosofis kebebasan, keadilan, kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Sifat pendidikan multikultural mempersiapkan semua siswa untuk secara aktif bekerja menuju struktur umum dalam organisasi dan institusi sekolah. Pendidikan multikultural bukanlah kebijakan yang mengarah pada pendidikan inklusif dan pelembagaan pendidikan melalui propaganda pluralisme dengan kurikulum yang berkontribusi pada persaingan budaya individu. Tujuan pembelajaran multikultural adalah membekali siswa dengan kemampuan untuk mengembangkan rasa hormat terhadap orang-orang yang berbeda budaya dan memberi mereka kesempatan untuk bekerja secara langsung dengan orang atau kelompok orang yang berbeda suku dan ras. Pendidikan multikultural juga membantu siswa memahami relevansi perspektif budaya yang berbeda, membantu siswa bangga dengan warisan budayanya, dan membantu memastikan bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan mendasari konflik antar kelompok masyarakat (Savage & Armstrong, 1996). Pendidikan multikultural dipraktekkan untuk membantu siswa melihat kehidupan dari perspektif budaya yang berbeda dari mereka sendiri dan untuk mengembangkan keterampilan untuk memiliki sikap positif terhadap perbedaan budaya, ras dan etnis. (Farris & Cooper, 1994).

Adapun tujuan pendidikan dengan berbasis multikultural menurut Banks (Skeel, 1995) dapat diidentifikasi berdasarkan hal-hal berikut ini.

- a) Untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam;
- b) Untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, dan kelompok keagamaan;
- c) Memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya;
- d) Untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok

Di samping itu, pembelajaran berbasis multikultural dibangun atas dasar konsep pendidikan untuk kebebasan (Dickinson, 2011); yang bertujuan untuk: Membantu siswa atau mahasiswa mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk

berpartisipasi di dalam demokrasi dan kebebasan masyarakat; Memajukan kebebasan, kecakapan, keterampilan terhadap lintas batas-batas etnik dan budaya untuk berpartisipasi dalam beberapa kelompok dan budaya orang lain. Alasan kami berpikir rasional tentang pentingnya pendidikan multikultural adalah karena strategi pendidikan ini dipandang sebagai suatu kebajikan. Secara khusus, ia unggul dalam aspek-aspek berikut: Bertabrakan tanpa kekerasan. Penerapan pendekatan dan strategi pembelajaran potensial yang memfasilitasi proses interaksi sosial dan memiliki muatan emosional yang kuat. Model pembelajaran multikultural membantu guru membuat proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Secara khusus, ini membantu guru membuat proses pembelajaran lebih efisien dan efektif dengan membekali siswa dengan kemampuan untuk membangun bersama dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat pluralistik yang bernilai tinggi. Dengan meningkatkan empati dan mengurangi prasangka, kita akan berkontribusi kepada masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan dan mengelola konflik bernuansa SARA yang muncul di masyarakat.

Keragaman sosial dan budaya secara positif menunjukkan potensi yang kaya dari masyarakat pluralistik, tetapi secara negatif, orang merasa tidak aman tentang ketidaktahuan mereka tentang budaya satu sama lain. Semua etnis atau ras rentan terhadap etnosentrisme dan ideologi yang mengklaim kelompoknya lebih unggul dari kelompok etnis atau ras lainnya. (Alo, 2005). Ketika ketidaktahuan tentang identitas budaya orang lain terjadi, prasangka terhadap orang lain dapat diperkuat dalam bentuk generalisasi palsu, yang diekspresikan sebagai perasaan dan dengan demikian antipati. Prasangka juga ditujukan terhadap kelompok secara keseluruhan atau terhadap individu hanya karena mereka adalah anggota kelompok tertentu. Secara demikian, prasangka memiliki potensi dalam mengkambing hitamkan orang lain melalui stereotipe, diskriminasi dan penciptaan jarak sosial (Bennet dan Janet, 1996).

Melalui pembelajaran multikultural, subyek belajar dapat mencapai kesuksesan dalam mengurangi prasangka dan diskriminasi (A. Bank, 1993). James A. Banks lebih lanjut (Banks, n.d.), Identifikasi lima aspek pendidikan multikultural yang diharapkan dapat mendukung guru dalam mengimplementasikan berbagai program yang dapat mengatasi perbedaan siswa.

- a) Dimensi integrasi isi/materi (*content integration*). Dimensi ini digunakan guru untuk memberikan informasi tentang “poin-poin kunci” pembelajaran dengan melihat kembali berbagai materi. Secara khusus, guru mengintegrasikan isi materi pembelajaran ke dalam kurikulum dari perspektif yang berbeda. Pendekatan yang umum adalah mengakui kontribusi mereka. Artinya, guru mendekati kurikulum dengan membatasi fakta tentang kepahlawanan dari berbagai kelompok. RPP dan unit belajar juga tidak berubah. Beberapa pendekatan memungkinkan guru untuk menambahkan beberapa unit atau tema khusus untuk materi multikultural.
- b) Dimensi konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*). Sebuah dimensi di mana guru membantu siswa memahami perspektif yang berbeda dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin ilmu yang mereka miliki. Dimensi ini juga berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap perubahan pengetahuannya sendiri;
- c) Dimensi pengurangan prasangka (*prejudice reduction*). Guru berusaha keras untuk memastikan bahwa siswa memiliki sikap positif terhadap perbedaan kelompok. Misalnya, ketika anak-anak datang ke sekolah dengan perilaku negatif dan kesalahpahaman tentang berbagai ras, etnis, dan kelompok etnis lainnya, pendidikan dapat membantu siswa belajar lebih positif dengan menciptakan kondisi yang stabil dan pasti. Membantu mengembangkan perilaku antarkelompok yang baik.

Dua kondisi yang menjadi perhatian adalah bahan ajar yang memiliki citra positif tentang perbedaan kelompok dan penggunaan bahan ajar tersebut secara konsisten dan berkesinambungan. Studi menunjukkan bahwa siswa yang datang ke sekolah dengan banyak stereotip cenderung berperilaku negatif dan sering salah paham terhadap kelompok etnis dan ras di luar kelompoknya. Penelitian menunjukkan bahwa menggunakan buku teks multikultural dan materi lainnya serta menggunakan strategi pembelajaran kolaboratif dapat membantu siswa mengembangkan sikap dan kesadaran rasial yang lebih positif. Strategi dan jenis sumber daya memungkinkan siswa memilih untuk bersikap baik kepada kelompok ras, etnis, dan budaya lainnya.

- d) Dimensi pendidikan yang sama/adil (*equitable pedagogy*). Aspek ini berfokus pada bagaimana pengaturan pembelajaran dapat dimodifikasi untuk memfasilitasi pencapaian hasil belajar untuk kelompok siswa yang berbeda. Strategi dan kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam memperjuangkan keadilan pendidikan antara lain kooperatif (*cooperative learning*) dan non-competitive (*competitive learning*). Aspek ini bertujuan untuk membentuk lingkungan sekolah menjadi banyak jenis kelompok, termasuk suku, perempuan dan siswa berkebutuhan khusus, memberikan pengalaman pendidikan dengan hak yang sama dan kesempatan belajar yang sama, juga terkait dengan pendidikan.
- e) Dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*). Aspek ini penting untuk memperkuat budaya siswa bersekolah dari kelompok yang berbeda. Selain itu, membangun struktur sosial (sekolah) yang memanfaatkan potensi budaya siswa yang beragam sebagai ciri dari struktur sekolah lokal, seperti latihan kelompok, iklim sosial, latihan, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, penghargaan untuk staf, dll bisa digunakan dalam menanggapi perbedaan ketika mereka terlibat dalam hal yang berbeda.

Dengan menerapkan dimensi pendidikan multikultural di atas, guru diharapkan mampu memfasilitasi siswa dan menghadapi siswa dalam keberagaman. Begitu juga dengan bahan pelajaran, Materi dan kegiatan pembelajaran dengan aspek emosional yang kuat dari simbiosis antarbudaya terbukti efektif dalam menumbuhkan perspektif yang fleksibel (Byrnes, 1988). Seorang siswa yang sangat berempati memungkinkan dia untuk menghormati sudut pandang yang berbeda. Tentu saja, dalam hal ini juga dapat meruntuhkan prasangka terhadap kelompok lain (Walker-Dalhouse, 1992).

4. KESIMPULAN

Multikulturalisme pada dasarnya merupakan sebuah paham yang menjunjung tinggi kesetaraan dan kesederajatan dalam keberagaman. Titik penting dari multikulturalisme adalah adanya upaya saling keterbukaan dan saling menerima perbedaan. Pendidikan multikultural di Indonesia diimplementasikan untuk menemukan bentuk ideal dari praktek pendidikan yang mengedepankan keberagaman suku bangsa. Pendidikan multicultural dapat diimplementasikan melalui pendidikan formal dan dapat juga diimplementasikan lewat pendidikan nonformal. Dalam pendidikan formal, pendidikan multicultural tidak perlu dirancang khusus dalam mata pelajaran tersendiri, tetapi cukup diintegrasikan dalam kurikulum yang sudah ada melalui bahan ajar atau model pembelajaran. Di perguruan tinggi pendidikan multicultural diintegrasikan kedalam mata kuliah umum (MKU), seperti pendidikan Kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, Agama dan Bahasa. Pada tingkat SD hingga SMA/Sederajat, pendidikan multicultural dapat diintegrasikan dalam bahan ajar Agama, PKn, Sosiologi, dan Antropologi, serta kegiatan ekstra kurikuler seperti kepramukaan. Dalam pendidikan nonformal, pendidikan multicultural dapat disosialisasikan melalui pelatihan-pelatihan dengan model pembelajaran yang responsif multicultural dengan

mengedepankan penghormatan terhadap perbedaan, baik ras, suku maupun agama antar anggota masyarakat. Jika pendidikan multikultural ini dapat dilaksanakan, maka kesadaran nasional dan sikap nasionalisme di tanah air ini dapat dibangkitkan kembali sebagaimana awal perjuangan para perintis bangsa ini mulai dari Budi Utomo hingga perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Kita generasi sekarang ini dalam mengisi kemerdekaan hanya dituntut sikap saling toleran dan saling menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita dan belajar dengan giat untuk membangun bangsa ke arah yang lebih baik, yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Bank, J. (1993). *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. Allyn and Bacon Press.
- Afiyanti, Y. (2014). Penggunaan Literatur Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 9(1), 2003–2006. <https://doi.org/10.7454/jki.v9i1.157>
- Alo, L. (2005). *Komunikasi Antarpribadi*. Citra Aditya Bakti.
- Azzuhri, M. (2012). Konsep multikulturalisme dan pluralisme dalam pendidikan agama. *Forum Tarbiyah*, 10(1), 13–29.
- Banks, J. A. (n.d.). *Multiculturalism's Five Dimensions*.
- Damayanti, A. (2017). *Pancasila Dalam Menjaga Keutuhan NKRI dari Aksi Intoleransi di Indonesia*. 1–13.
- Dickinson, V. (2011). Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle. *The Accounting Review*, 86(6).
- Effendy, B. (2003). *Islam and the State in Indonesia*. ISEAS.
- Farris, P. ., & Cooper, S. . (1994). *Elementary Social Studies: a Whole language Approach*. Brown & Benchmark Publishers.
- Hakim, N. R. (2020). *Tantangan Negara Multikultur dan Solusinya*. BINUS: Universitas Bina Nusantara. <https://binus.ac.id/character-building/2020/05/tantangan-negara-multikultur-dan-solusinya/>
- Kerebungu, F. (2019). *Pengkajian Informasi Potensi Konflik dan Integrasi Bangsa*. Wineka Media. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=11724524374458868650&hl=en&oi=scholar>
- Kerebungu, F., & Fathimah, S. (2020). Pembangunan PLTA Palu-3 (Kajian Sosiologis-Antropologis atas Gagalnya Pembangunan PLTA Palu-3 di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah). *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 2(1), 19–25.
- Kerebungu, F., Fathimah, S., & Pangalila, T. (2020). Social Conflict in Community (Study On Agrarian Conflict in Lolak District, Bolaang District, Mongondow, North Sulawesi). *Atlantis Press*, 473(Icss), 211–214.
- Kerebungu, F., Pangalila, T., & Umar, M. (2019). *The Importance Of Multicultural Education As An Effort Towards Indonesian National Awareness*. 383(Icss), 797–800. <https://doi.org/10.2991/icss-19.2019.120>
- Kohlberg, L. (1995). *Tahap-Tahap Perkembangan Moral, diterjemahkan oleh Drs. John de Santo dan Drs. Agus Cremers SVD* (1st ed.). Kanisius.
- Kymlicka, W. (2015). *Kewargaan Multikultural* (Terjemahan). LP3ES.
- Lionar, U., & Mulyana, A. (2019). Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Sejarah: Identifikasi pada Silabus. *IJSSE: Indonesian Journal of Social Science Education*, 1(1), 11–25. <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/ijssse/article/view/11-25>
- Mahfud, C. (2016). *Pendidikan Mutikultural*. Pustaka Pelajar.

- Mudzhar, M. A. (2004). *Kebijakan Negara dan Pemberdayaan Lembaga dan Pemimpin Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan antar Umat Beragama*” dalam “*Damai di Dunia Damai untuk Semua: Perspektif Berbagai Agama*. Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Depag RI.
- Nainggolan, E., & Sasongko, D. (2020). *Pancasila: Nilai Luhur Bangsa dan Pondasi Bangunan NKRI*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/13234/Pancasila-Nilai-Luhur-Bangsa-dan-Pondasi-Bangunan-NKRI.html>
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian* (Cetakan Pe). Ghalia Indones.
- Rismawati. (2011). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Era Reformasi. *SEMINAR NASIONAL : Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era Reformasi*, 46–55.
- Said, M. M. (2013). Kajian Model Internalisasi Ideologi Kebangsaan di Daerah Perbatasan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(1), 17–25.
- Savage, & Armstrong. (1996). *Effective Teaching in Elementary Social Studies*. Prentice-Hall, Inc.
- Singh, B. (2001). *Habibie and The Democratisation of Indonesia*. Book House.
- Skeel, D. J. (1995). *Elementary Social Studies: Challenges for Tomorrow’s World*. Harcourt Brace & Company.
- Sleeter, C. E., & Grant, C. A. (2003). *Making Choices for Multicultural Education: Five Approaches To Race, Class, and Gender*. John Wiley & Sons, Inc.
- Surip, N., Syarbaini, S., Rahman HI, A., & C, A. A. (2015). *Pancasila dalam Makna dan Aktualisasi*. Andi.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Osbor Indonesia.